

TRANSPARANSI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
INOVASI



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

LAPORAN TARGET TRIWULAN III (B09) RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019

Disusun oleh Seknas Open Government Indonesia



	Halaman
Daftar Isi.....	2
Nilai-Nilai Open Government Indonesia.....	3
<i>Overview</i> RAN OGI Tahun 2018 – 2020.....	4
Gambaran Umum Capaian Target RAN OGI Tahun 2019.....	5
Persentase Capaian Target Triwulan I (B03) – II (B06) RAN OGI Tahun 2019.....	6
Persentase Capaian Target Triwulan III (B09) RAN OGI Tahun 2019.....	7
Komitmen dan Capaian Target RAN OGI Tahun 2019.....	8

Nilai-Nilai Open Government Indonesia

Open Government Indonesia (OGI)

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya



Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik



Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan



Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)



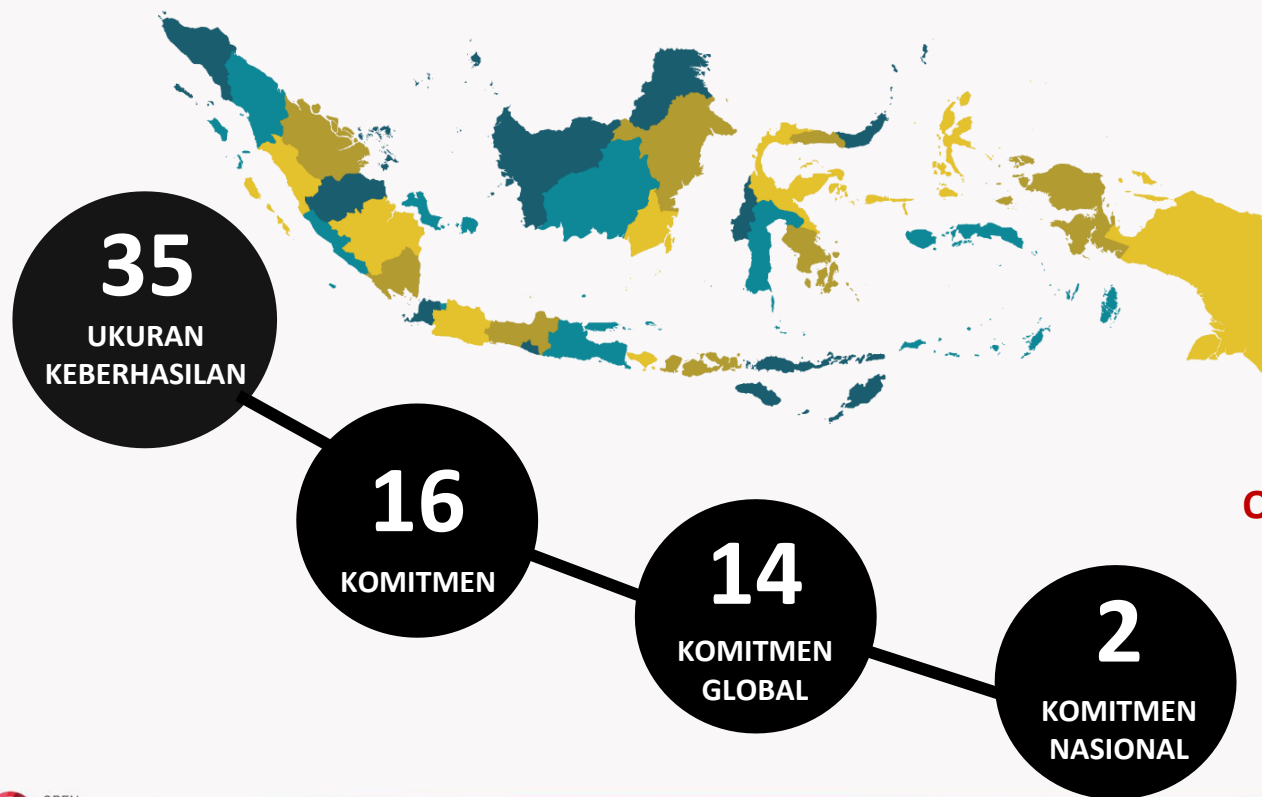
Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

**Transparansi
Partisipasi
Inovasi
Akuntabilitas**

Overview RAN OGI Tahun 2018 – 2020

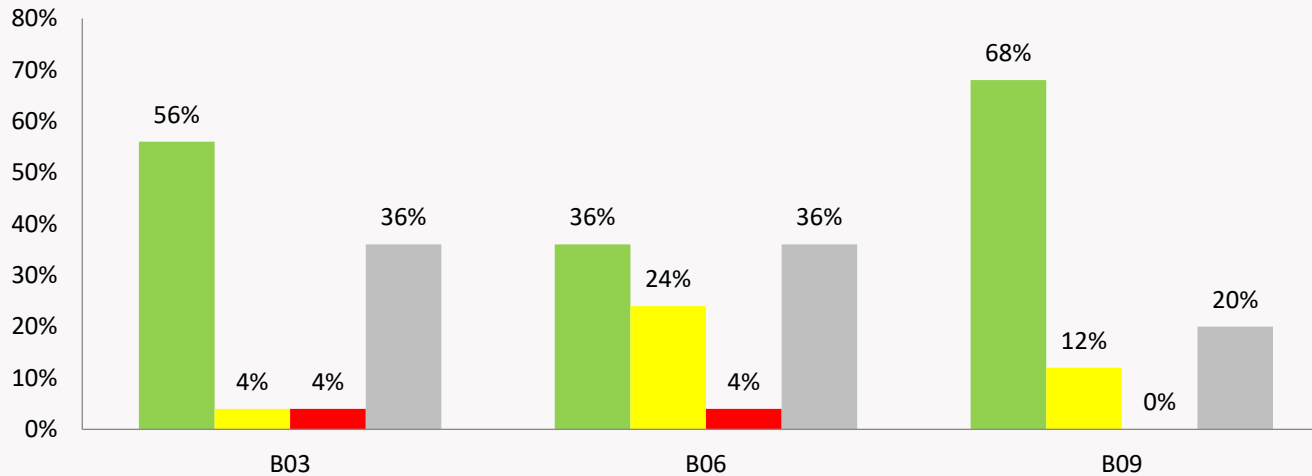


15
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENANGGUNG JAWAB

16
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Gambaran Umum Capaian Target RAN OGI Tahun 2019

Persentase Capaian Target TW I (B03) - TW III (B09)
Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia (OGI)
Tahun 2019

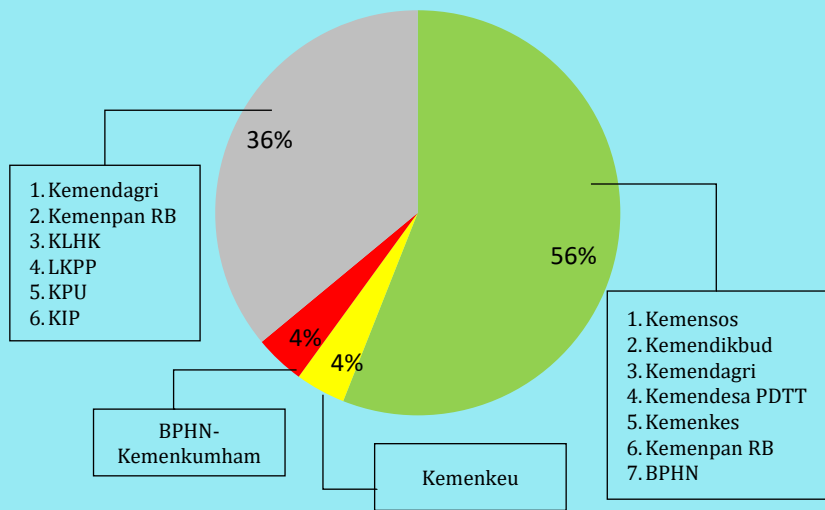


Keterangan:

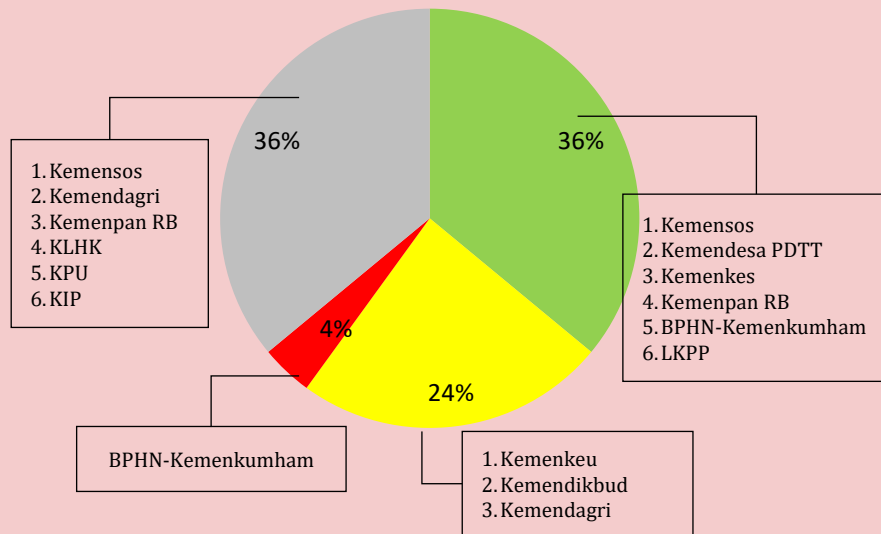
- Tercapai
- Tidak tercapai
- Tidak dilaporkan
- Tidak ada target

Persentase Capaian Target TW I (B03) dan TW II (B06) Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) Tahun 2019

Capaian Target B03 RAN OGI Tahun 2019



Capaian Target B06 RAN OGI Tahun 2019



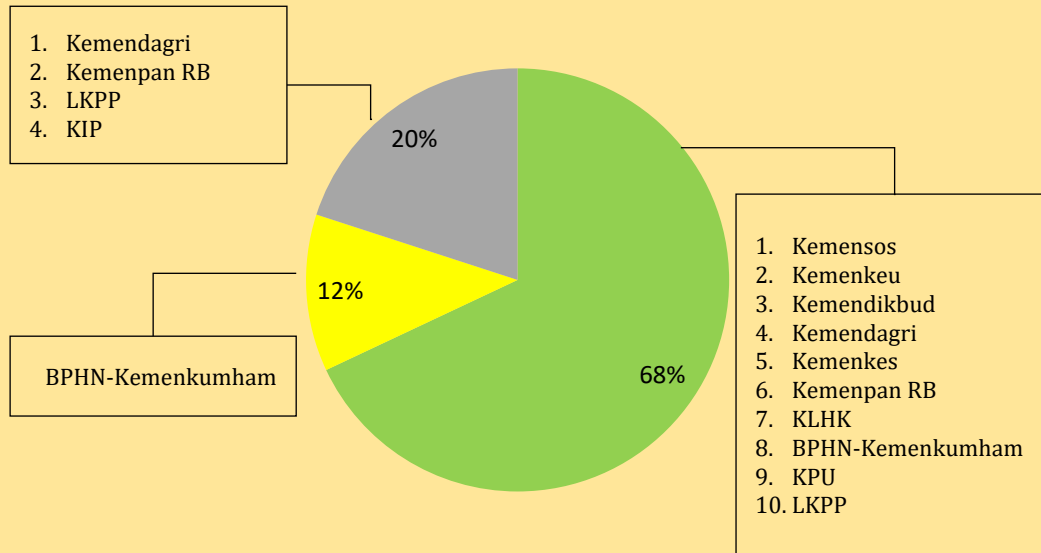
Keterangan:

■ Tercapai
■ Tidak tercapai

■ Tidak dilaporkan
■ Tidak ada target

Persentase Capaian Target TW III (B09) Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) Tahun 2019

Capaian Target B09 RAN OGI Tahun 2019
Per Tanggal 16 Oktober 2019



Keterangan:

■ Tercapai
■ Tidak tercapai

■ Tidak dilaporkan
■ Tidak ada target



Komitmen dan Capaian Target RAN OGI Tahun 2019

Komitmen RAN OGI Tahun 2018 - 2020

Selama kurun waktu 2018-2019, OGI membuat 16 Rencana Aksi Nasional

Komitmen Global:

1. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan;
2. Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan;
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/ Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah;
4. Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif;
5. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa;
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislati;
7. Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
8. Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah;
9. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik;
10. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N;
11. Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia;
14. Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum;

Komitmen Nasional:

15. Pengarusutamaan Nilai-Nilai Keterbukaan Pemerintah pada Rencana Program Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang di Instansi Pemerintah Daerah;
16. Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia.

Komitmen 1 RAN OGI 2018-2020

Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Sasaran:

Tersedianya dan dimanfaatkannya basis data BO (*Beneficial Ownership*)/Pemilik Manfaat dari Korporasi

Ukuran Keberhasilan:

1. Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi.
2. Digunakannya basis data *beneficial ownership* untuk pencegahan penyalahgunaan *legal persons/arrangements* untuk tujuan anti pencucian uang/pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan penyalahgunaan perpajakan.
3. Digunakannya basis data *beneficial ownership* sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit.

K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait	CSO (<i>Civil Society Organization</i>) Mitra
<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional6. Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Bank Indonesia2. Otoritas Jasa Keuangan3. Kemenkop dan UKM4. Kemenko Polhukam5. Kemen LHK6. Kemen ATR/BPN7. Kemenko Perekonomian8. Kemendag9. LKPP10. KPPU11. Seknas Stranas PK	<p>Publish What You Pay (PWYP) Indonesia</p>

Komitmen 1 RAN OGI 2018-2020

Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Penanggung Jawab	UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Realisasi Target (Dokumen Pendukung)
Kemenkumham	UK1	TW I (B03)	1.Terbitnya Permenkumham tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi 2.Terbitnya Permenkumham tentang Pendaftaran Koperasi	1. Permenkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi telah terbit pada bulan Juni 2019. 2. Permenkumham No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi
		TW II (B06)	1.Terbitnya Permenkumham tentang Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi 2.Sosialisasi Permenkumham tentang tata cara mengenali pemilik manfaat, Permenkumham tentang pendaftaran koperasi dan Permenkumham tentang pengawasan 3.Tersedianya sistem yang mewajibkan korporasi lama dan baru untuk men- <i>declare</i> pemilik manfaat dari korporasi (<i>beneficial ownership</i>)	1. Permenkumham No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi telah terbit pada bulan September 2019 2. Sosialisasi telah dilaksanakan di beberapa kota 3. Sistem telah tersedia
		TW III (B09)	Persentase korporasi (lama dan baru) yang telah mengisi data <i>beneficial ownership</i> ke dalam sistem	Data telah tersedia

Komitmen 1 RAN OGI 2018-2020

Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Penanggung Jawab	UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Realisasi Target (Dokumen Pendukung)
1.Kemenkumham 2.Kemenkop dan UKM	UK1	TW I (B03)	Terintegrasinya data koperasi ke dalam AHU online	Hingga B09 belum terintegrasi
1.Kemenkumham 2.PPATK 3.Kemenkeu 4.Kementerian ESDM 5.Kementerian Pertanian 6.Kemenkop dan UKM 7.Kementerian ATR/BPN	UK2 dan UK3	TW II (B06)	Tersedianya Nota kesepahaman dan Perjanjian kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi lain yang berkepentingan dan juga dengan aparat penegak hukum	MoU dan PKS telah ditandatangani pada bulan Juli 2019
1.Kementerian ESDM 2.Kementerian Pertanian 3.Kemenkop dan UKM 4.Kementerian ATR/BPN	UK2 dan UK3	TW III (B09)	Terbitnya kebijakan/regulasi yang mengatur tentang korporasi untuk menyampaikan data <i>beneficial ownership</i> sebagai syarat pengajuan izin	1. Permen Pertanian No. 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian 2. SK Menteri ATR/Kepala BPN Nomor: 6/SE-HM.01/IX/2019 tentang Pengendalian Pemilik Manfaat dan Perusahaan Terafiliasi dalam Proses Penetapan dan Peralihan Hak Atas Tanah

Komitmen 1 RAN OGI 2018-2020

Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Penanggung Jawab	UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Realisasi Target (Dokumen Pendukung)
1.Kementerian ESDM 2.Kementerian Pertanian 3.Kemenkop dan UKM 4.Kementerian ATR/BPN	UK2 dan UK3	TW III (B09)	Terbitnya kebijakan/regulasi yang mengatur tentang korporasi untuk menyampaikan data <i>beneficial ownership</i> sebagai syarat pengajuan izin	3. Permen KUKM Nomor: 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Koperasi yang melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Komitmen 1 RAN OGI 2018-2020

Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Data Korporasi yang Menyampaikan Informasi *Beneficial Ownership*

Korporasi Lama

Korporasi yang telah menyampaikan informasi BO sejak diundangkannya Perpres13 Tahun 2018 (**5 Maret 2018**) sampai dengan diundangkannya Permenkumham No. 15 Tahun 2019 (**27 Juni 2019**)

Korporasi	Telah Isi BO	Jumlah Total Korporasi	%
PT	20612	923037	2,23%
Perkumpulan	1542	164827	0,93%
Yayasan	2475	212660	1,16%
CV	12985	157672	8,23%
Firma	100	1258	7,94%
Persekutuan Perdata	130	1769	7,34%

Korporasi Baru

Korporasi yang telah menyampaikan informasi BO sejak diundangkannya Permenkumham No. 15 Tahun 2019 (**27 Juni 2019**) sampai dengan **4 Okt 2019**

Korporasi	Telah Isi BO	Jumlah Total Korporasi	%
PT	7715	923037	0,83%
Perkumpulan	434	164827	0,26%
Yayasan	737	212660	0,34%
CV	11846	157672	7,51%
Firma	81	1258	6,43%
Persekutuan Perdata	86	1769	4,86%

TOTAL

Korporasi	Telah Isi BO	Jumlah Total Korporasi	%
PT	28327	923037	3,06%
Perkumpulan	1976	164827	1,19%
Yayasan	3212	212660	1,51%
CV	24831	157672	15,74%
Firma	181	1258	14,38%
Persekutuan Perdata	216	1769	12,21%

Sumber: Setnas PK, 2019

Komitmen 2 RAN OGI 2018-2020

Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan

K/L Penanggung Jawab:

Kementerian Sosial

K/L Terkait:

1. Kemendagri
2. Kemenkes
3. Kemenko PMK

CSO Mitra:

Media Link
(Perkumpulan Media Lintas Komunitas)

Sasaran Akhir

Terpublikasinya informasi yang valid terkait data kesejahteraan sosial

Ukuran Keberhasilan (UK)

UK1:

Ketersediaan informasi tentang data kesejahteraan sosial yang dapat diakses melalui website.

UK2:

Keputusan menteri tentang perubahan data yang dipublikasikan.

Keterangan:



Tercapai



Tidak tercapai



Tidak dilaporkan



Tidak ada target

UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK1	TW I (B03)	Publikasi buku profil analisis data kesejahteraan sosial	
	TW II (B06)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B03 dan B09)</i>	
	TW III (B09)	Publikasi informasi mekanisme verifikasi dan validasi data dalam bentuk leaflet/booklet yang dapat diunduh melalui website	
UK2	TW I (B03)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri tentang perubahan Data Terpadu 2. Keputusan Menteri tentang Perubahan Data PBI (Penerima Bantuan Iuran) JK (Jaminan Kesehatan) 	
	TW II (B06)	Keputusan Menteri tentang perubahan data yang dipublikasikan	
	TW III (B09)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri tentang perubahan data terpadu 2. Keputusan Menteri tentang perubahan data PBIJK 	

Komitmen 3 RAN OGI 2018-2020

Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di K/L Terkait dan Semua Pemerintah Daerah

K/L Penanggung Jawab:

- 1.Kemenkeu
- 2.Kemendagri



K/L Terkait:



- 1.Kemendikbud
- 2.Kemenkes
- 3.Kemensos
- 4.Kementerian PPN/Bappenas
- 5.KSP
- 6.KIP

CSO Mitra:

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Keterangan:

-  Tercapai
-  Tidak tercapai

-  Tidak dilaporkan
-  Tidak ada target

Sasaran Akhir

Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Kementerian/Lembaga (K/L)

Ukuran Keberhasilan (UK)




UK1:

Terbangunnya komitmen publikasi data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan antara Kementerian Keuangan dan K/L terkait




UK2:

Terbangunnya Portal APBD

Penanggung Jawab: Kementerian Keuangan

UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK1	TW I (B03)	Terselenggaranya rapat koordinasi antar K/L terkait tentang strategi publikasi data anggaran pendidikan	
	TW II (B06)	Terselenggaranya rapat koordinasi antar K/L terkait tentang strategi publikasi data anggaran kesehatan	
	TW III (B09)	Tersedianya publikasi data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan	

Penanggung Jawab: Kementerian Dalam Negeri

UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK2	TW I (B03)	<i>Tidak ada target capaian (target capaian dilaporkan pada B12)</i>	
	TW II (B06)	<i>Tidak ada target capaian (target capaian dilaporkan pada B12)</i>	
	TW III (B09)	<i>Tidak ada target capaian (target capaian dilaporkan pada B12)</i>	

Komitmen 4 RAN OGI 2018-2020

Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif

K/L Penanggung Jawab:

Kemendikbud




K/L Terkait:

1. Ombudsman
2. Kemendagri

CSO Mitra:

Transparency International Indonesia (TII)

Keterangan:

-  Tercapai
-  Tidak tercapai
-  Tidak dilaporkan
-  Tidak ada target

Sasaran Akhir

Tersedianya usulan perencanaan anggaran berbasis data Neraca Pendidikan Daerah (NPD)

Ukuran Keberhasilan (UK)

UK1:

Sosialisasi halaman Neraca Pendidikan Daerah (NPD) kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah pada 15 Provinsi.

UK2:

Terselenggaranya kegiatan/forum diskusi perencanaan anggaran pendidikan dengan masyarakat pada 15 Provinsi.

UK3:

Tersedianya rekomendasi berbasis NPD dalam perencanaan anggaran pendidikan daerah berbasis NPD pada 15 provinsi.

UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK1	TW I (B03)	1. Analisis tren kinerja pendidikan berdasarkan NPD 2015 – 2018. 2. Sosialisasi NPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah pada 2 provinsi.	
	TW II (B06)	Sosialisasi NPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah pada 5 provinsi	
	TW III (B09)	Sosialisasi NPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah pada 6 provinsi.	
UK2	TW I (B03)	Diskusi perencanaan anggaran pendidikan daerah dengan masyarakat pada 2 provinsi	
	TW II (B06)	Diskusi perencanaan anggaran pendidikan daerah dengan masyarakat pada 5 provinsi	
	TW III (B09)	Diskusi perencanaan anggaran pendidikan daerah dengan masyarakat pada 6 provinsi	
UK3	TW I (B03)	Tersusunnya rekomendasi perencanaan anggaran pendidikan daerah berbasis NPD pada 2 Provinsi	
	TW II (B06)	Tersusunnya rekomendasi perencanaan anggaran pendidikan daerah berbasis NPD pada 5 Provinsi	
	TW III (B09)	Tersusunnya rekomendasi perencanaan anggaran pendidikan daerah berbasis NPD pada 6 Provinsi	

Komitmen 5 RAN OGI 2018-2020

Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa

K/L Penanggung Jawab:

1. Kemendagri
2. Kemendesa PDTT

K/L Terkait:

1. Kantor Staf Presiden
2. Kementerian PPN/Bappenas

CSO Mitra:

1. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
2. Wahana Visi Indonesia (WVI)

Sasaran Akhir

1. Terlaksananya penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan Musyawarah Desa yang partisipatif
2. Tersedianya harmonisasi peraturan Kementerian Desa terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa

Ukuran Keberhasilan (UK)

UK1:

Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di 30 desa pada 3 Provinsi (Maluku, Jawa Tengah dan Sumatera Barat).

UK2:

Tersedianya Draft Rancangan Permendes tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

UK3:

Tersedianya juknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Penanggung Jawab: Kementerian Desa PDTT


UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK2	TW I (B03)	Penyelenggaraan rapat internal Kementerian Desa PDTT terkait penyusunan draft rancangan Permendes tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa	
	TW II (B06)	Penyusunan Draft Rancangan Permendes tentang Pedoman Tata Tertib mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa	
	TW III (B09)	1. Rancangan Permendesa PDTT tentang Musyawarah Desa 2. Notulensi Workshop Finalisasi Rancangan Perubahan Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musaywarah Desa	

Keterangan:

 Tercapai

 Tidak tercapai

 Tidak dilaporkan

 Tidak ada target

Komitmen 5 RAN OGI 2018-2020

Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa


Penanggung Jawab: Kementerian Dalam Negeri			
UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK1	TW I (B03)	Terlaksananya bimtek di 30 desa pada 3 Provinsi (Maluku, Jawa Tengah dan Sumatera Barat)	
	TW II (B06)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B03)</i>	
	TW III (B09)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B03)</i>	
UK3	TW I (B03)	Rakernis Penguatan Kelembagaan BPD, Pelaksanaan Musyawarah Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa	
	TW II (B06)	Tersusunnya draft Juknis Musyawarah Desa	
	TW III (B09)	1.Laporan Bimtek Pengelolaan Proses dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa di 31 desa pada 3 provinsi 2.Terselenggaranya FGD evaluasi Musdes dan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa	

Keterangan:

 Tercapai

 Tidak tercapai

 Tidak dilaporkan

 Tidak ada target

Komitmen 6 RAN OGI 2018-2020

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislati

K/L Penanggung Jawab:

Kemendagri

K/L Terkait:

1. KIP
2. Kementerian Kominfo

CSO Mitra:

1. Indonesia Parliamentary Center (IPC)
2. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia

Sasaran Akhir

Tersedianya portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat

Ukuran Keberhasilan (UK)


UK1:
Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui platform E-Legislati.


UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK 1	TW I (B03)	Koordinasi pemantapan/ penajaman konsep renaksi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda melalui e-legislasi	
	TW II (B06)	Tersedianya Surat Edaran Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui portal e-legislasi	
	TW III (B09)	Sosialisasi ketersediaan platform e-legislasi dalam website DPRD yang dilakukan di DPRD Kota Semarang dan Pemprov D.K.I Jakarta	

Keterangan:

 Tercapai

 Tidak tercapai

 Tidak dilaporkan

 Tidak ada target

Komitmen 7 RAN OGI 2018-2020

Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

K/L Penanggung Jawab:

KPU

K/L Terkait:

1. Kemendagri
2. Bawaslu
3. Kementerian PPN/Bappenas

CSO Mitra

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Sasaran

Terciptanya transparansi data kepiluan yang dapat diakses oleh masyarakat

Ukuran Keberhasilan (U)

U1:










Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pemilu 2019 secara online di portal resmi KPU

U2:

Integrasi publikasi data penyelenggaraan pemilu dalam satu portal resmi KPU

U3:

Tersedianya publikasi seluruh data KPU dalam bentuk data terbuka

UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK1	TW I (B03)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B09 dan B12)</i>	
	TW II (B06)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B09 dan B12)</i>	
	TW III (B09)	Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS secara online di portal resmi KPU	
UK2	TW I (B03)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B09 dan B12)</i>	
	TW II (B06)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B09 dan B12)</i>	
	TW III (B09)	Integrasi publikasi data penyelenggaraan pemilu dalam satu portal resmi KPU	
UK3	TW I (B03)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B09 dan B12)</i>	
	TW II (B06)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B09 dan B12)</i>	
	TW III (B09)	Tersedianya publikasi seluruh data KPU dalam bentuk data terbuka	

Keterangan:

 Tercapai

 Tidak tercapai

 Tidak dilaporkan

 Tidak ada target

Komitmen 8 RAN OGI 2018-2020

Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah

K/L Penanggung Jawab:

Kemenkes

K/L Terkait:

Kemendagri

CSO Mitra:

Indonesia Corruption
Watch (ICW)

Sasaran Akhir

Publikasi informasi yang valid terkait ketersediaan layanan kesehatan pada Rumah Sakit milik Pemerintah dan Puskesmas







Ukuran Keberhasilan (UK)

UK1:

Tersedianya data identitas, informasi tentang identitas, tempat tidur, dan tenaga medis di Puskesmas.

UK2:


Tersedianya Aplikasi RS Online yang dapat diakses oleh dinas kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK1	TW I (B03)	Rapat koordinasi pengelolaan data dasar puskesmas di Kementerian Kesehatan	
	TW II (B06)	1. Pengembangan aplikasi IHeFF untuk dapat menampilkan data identitas dan tempat tidur di puskesmas berdasarkan data dasar puskesmas 2. Sosialisasi iHeFF	
	TW III (B09)	Pengintegrasian aplikasi IHeFF dengan aplikasi SI SDM untuk data ketenagaan di puskesmas	
UK2	TW I (B03)	Sosialisasi RS Online baru ke Dinas Kesehatan Provinsi	
	TW II (B06)	Tersedianya konsep awal aplikasi ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit (SIRANAP) pada aplikasi RS Online	
	TW III (B09)	Pertemuan Koordinasi Pembahasan konten/variabel untuk integrasi RS Online dengan SIRANAP	

Keterangan:

 Tercapai

 Tidak tercapai

 Tidak dilaporkan

 Tidak ada target

Komitmen 9 RAN OGI 2018-2020

Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik

K/L Penanggung Jawab:

Kemenpan RB

K/L Terkait:

1. Kemendikbud
2. Kemenkes
3. Kemensos
4. Kemendagri
5. Kemendesa PDTT

CSO Mitra:

1. Yappika-Action Aid
2. Pusat Telaah dan Informasi Regional




Sasaran Akhir

Terlaksananya forum konsultasi publik di Instansi Pemerintah

Ukuran Keberhasilan (UK)


UK 1:


Terlaksananya sosialisasi Forum Konsultasi Publik di 90 Instansi Pemerintah


UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK 1	TW I (B03)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B09 dan B12)</i>	
	TW II (B06)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B09 dan B12)</i>	
	TW III (B09)	Terlaksananya sosialisai FKP di 40 instansi pemerintah	

Keterangan:

 Tercapai

 Tidak tercapai

 Tidak dilaporkan

 Tidak ada target

Komitmen 10 RAN OGI 2018-2020

Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N

K/L Penanggung Jawab:

Kemenpan RB

K/L Terkait:

1. KSP
2. Ombudsman
3. Kemendagri

CSO Mitra:

1. Yappika - Action Aid
2. Pusat Telaah dan Informasi Regional

Sasaran Akhir

1. Peningkatan jumlah keterhubungan LAPOR!-SP4N
2. Peningkatan jumlah pengaduan ditindaklanjuti dalam LAPOR!-SP4N
3. Peningkatan tingkat kepatuhan pengelolaan SOP LAPOR-SP4N

Ukuran Keberhasilan (UK)

UK 1:


Peningkatan penetrasi LAPOR! -SP4N di 500 lembaga pemerintah




Keterangan:

 Tercapai

 Tidak tercapai

 Tidak dilaporkan

 Tidak ada target

UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK 1	TW I (B03)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pertemuan dengan mengundang Tim Kelompok Kerja Penerapan Aplikasi Umum dalam rangka Percepatan Penerapan SPBE untuk menyepakati SP4N- LAPOR menjadi Aplikasi Umum. 2. Mengirimkan Permohonan menjadi anggota Pokja Percepatan Aplikasi Umum SP4N-LAPOR kepada Kementerian/Lembaga. 3. Terselenggaranya rapat evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! dengan mengundang perwskilan dari Polisi Republik Indonesia. 4. Terselenggaranya Rapat Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! dengan mengundang perwakilan OJK. 5. Terselenggaranya rapat pembahasan Standar Proses Bisnis dan Standar Data SP4N-LAPOR! dengan Tim Internal yang kemudian disampaikan pada Tim Pokja untuk disempurnakan. 6. Mengirim surat resmi tentang Tindak Lanjut Pemantauan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik berdasarkan platform national aplikasi LAPOR! kepada 34 Gubernur di Indonesia. 7. Terlaksananya rapat kerja pengembangan SP4N-LAPOR! dan pembahasan Rancangan Permen PANRB tentang Road Map SP4N-LAPOR! Dari K/L dan pemerintah Daerah 	
	TW II (B06)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! dengan Mengundang BAWASLU laporkan pada B09. 2. Pendampingan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SP4N-LAPOR 	
	TW III (B09)	Tidak ada target (target dilaporkan pada B03 dan B06)	

Komitmen 11 RAN OGI 2018-2020

Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

K/L Penanggung Jawab:
KLHK

K/L Terkait:

- 1.Kemenpan RB
- 2.KSP
- 3.Ombudsman RI

CSO Mitra:

Indonesian Center for
Enviironmental Law (ICEL)




Sasaran Akhir

Tersedianya Sistem Pelayanan
Pengelolaan Pengaduan dan
Pengawasan Satu Pintu Pada
Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Ukuran Keberhasilan (UK)


UK 1:

Penerbitan Surat Keputusan
Sekretaris Jenderal tentang
tim manajemen LAPOR!-SP4N
dalam KLHK.


UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK 1	TW I (B03)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B09 dan B12)</i>	
	TW II (B06)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B09 dan B12)</i>	
	TW III (B09)	Tersedianya SK Sekjen tentang Tim Pengelola Aplikasi LAPOR! Lingkup KLHK	

Keterangan:

 Tercapai

 Tidak tercapai

 Tidak dilaporkan

 Tidak ada target

Komitmen 12 RAN OGI 2018-2020

Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

K/L Penanggung Jawab:
LKPP

K/L Terkait:
KPK

CSO Mitra:

1. Indonesia Corruption Watch (ICW)
2. Transparency International (TII)

Sasaran Akhir

Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan dan partisipatif

Ukuran Keberhasilan (UK)

UK 1:
Tersedianya update SK LKPP terkait Daftar Informasi Publik untuk dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan LKPP.


UK 2:
Workshop pengawasan pengadaan barang/jasa kepada organisasi masyarakat sipil baik di pusat maupun daerah.

UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK 1	TW I (B03)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B06 dan B09)</i>	
	TW II (B06)	Tersedianya draft update Daftar Informasi Publik untuk dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan LKPP	
	TW III (B09)	Tersedianya update SK LKPP terkait Daftar Informasi Publik untuk dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan LKPP	
UK 2	TW I (B03)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B06 dan B12)</i>	
	TW II (B06)	Terlaksananya workshop pengawasan barang/jasa dengan kolaborasi bersama CSO untuk kelompok masyarakat sipil di pusat dan/atau daerah.	
	TW III (B09)	<i>Tidak ada target (target dilaporkan pada B06 dan B12)</i>	

Keterangan:

 Tercapai

 Tidak tercapai

 Tidak dilaporkan

 Tidak ada target

Komitmen 13 RAN OGI 2018-2020

Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia

K/L Penanggung Jawab:

KIP (Komisi Informasi Pusat)

K/L Terkait:

1. KI Provinsi Jawa Barat
2. KI Provinsi Jawa Tengah
3. KI Provinsi Jawa Timur
4. KI Provinsi Kalimantan Barat
5. KI Provinsi Sumatera Utara

CSO Mitra:

1. Open Data Lab (ODL)
2. Plan C

Catatan:

Dokumen target triwulanan KIP untuk RAN OGI Tahun 2018 – 2020 belum dikumpulkan secara resmi ke Sekretariat Nasional OGI

Sasaran Akhir

Belum ada sasaran akhir


Ukuran Keberhasilan (UK)

Belum ada ukuran keberhasilan


UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK 1	TW I (B03)	<i>Tidak ada target capaian</i>	
	TW II (B06)	<i>Tidak ada target capaian</i>	
	TW III (B09)	<i>Tidak ada target capaian</i>	

Keterangan:

 Tercapai

 Tidak tercapai

 Tidak dilaporkan

 Tidak ada target

Komitmen 14 RAN OGI 2018-2020

Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum

K/L Penanggung Jawab:
BPHN-Kemenkumham

K/L Terkait:
Kementerian
PPN/Bappenas

CSO Mitra:
Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI)

Sasaran Akhir
Tersedianya kerangka
regulasi dan
peningkatan
pelayanan bantuan
hukum di daerah

Ukuran Keberhasilan (UK)


UK 1:
Meningkatnya Jumlah Perda dan/atau Ranperda Bantuan Hukum di tingkat Kabupaten/Kota menjadi 100 Perda.


UK 2:
Meningkatnya jumlah penerima layanan bantuan hukum (penyuluhan hukum, konsultasi, pendampingan hukum) menjadi 10.000 orang.


UK 3:
Membaihnya indeks kepuasan penerima layanan bantuan hukum (25% target penerima menyatakan cukup puas atau sangat puas).








Keterangan:

 Tercapai

 Tidak tercapai

 Tidak dilaporkan

 Tidak ada target

UK	TW	Target Per Triwulan Tahun 2019	Capaian
UK 1	TW I (B03)	Tersedianya 20 Perda dan/atau Ranperda bantuan hukum di tingkat Kabupaten/Kota.	
	TW II (B06)	Tersedianya 20 Perda dan/atau Ranperda bantuan hukum di tingkat	
	TW III (B09)	Tersedianya 20 Perda dan/atau Ranperda bantuan hukum di tingkat	
UK 2	TW I (B03)	Tersedianya pelayanan bantuan hukum pada 2500 orang.	
	TW II (B06)	Tersedianya pelayanan bantuan hukum pada 2500 orang	
	TW III (B09)	Tersedianya pelayanan bantuan hukum pada 2500 orang	
UK 3	TW I (B03)	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum (5%).	
	TW II (B06)	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum (5%).	
	TW III (B09)	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum (5%).	



Gedung MR21, lantai 11
Jalan Menteng Raya 21 DKI Jakarta 10340

<http://ogi.bappenas.go.id>
sekretariat.ogi@bappenas.go.id



@opengovindo

